

PEMBINAAN NASIONALISME PEMUDA PERBATASAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

M. Ishaq

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
e-mail: ishaqmaula@gmail.com

Abstract: Developing the Nationalism for the Youth in the National Borders through Out of School Educational Program. The study is aimed at determining the socio-economic problems, their cause and effect on their nationalism, and developing an out of school training program to improve the nationalism of the youth in national borders. The research method used in this study is qualitative analysis. The result indicates that the people in the remote areas are poor because of limited infrastructure, health care, and educational services which result in the migration, human trafficking, smuggling, and the nationalism crisis. The study also indicates that the out of school educational program can be effective if the educators guide the learners as the next generation to continue developing the country and train them to have a writing habit to accelerate their educational levels.

Abstrak: Pembinaan Nasionalisme Pemuda Perbatasan melalui Program Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan sosio-ekonomi, berikut penyebab dan pengaruhnya terhadap nasionalisme, dan mengembangkan model pembinaan nasionalisme bagi para pemuda daerah perbatasan negara melalui program pendidikan luar sekolah (PLS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa masyarakat daerah perbatasan negara banyak yang miskin karena terbatasnya infrastruktur, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan sehingga terjadi migrasi, perdagangan manusia, penyelundupan, serta krisis nasionalisme. Program PLS ini mendorong terjalinnya kerjasama antar berbagai pihak, brainstorming untuk menemukan krisis nasionalisme dan penyebabnya, *focussed group discussion* untuk menemukan jalan keluarnya, serta pelibatan warga belajar untuk mengevaluasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini bisa efektif jika para pendidik membimbing warga belajar sebagai kader penerus perjuangan bangsa; dan warga belajar membiasakan diri menulis untuk mempercepat mereka menjadi cerdas.

Kata Kunci: pendidikan luar sekolah, nasionalisme, pemuda perbatasan

Daerah perbatasan negara sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara. Daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menyimpan potensi sumber daya alam, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan sehingga belum mendorong kemandirian masyarakat setempat. Susilo (2008) menemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat di daerah perbatasan Kalimantan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sangat sulit menjangkau kota terdekat dan fasilitas pembangunan yang mereka dapatkan sangat tidak memadai, hidup miskin, dan bergantung pada Malaysia. Di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi penurunan nasionalisme, masyarakat setempat lebih banyak berinteraksi dengan warga di negara tetangga dan terpesona oleh uang ringgit, siaran TV dan radio, akses telepon dan transportasi, serta modal usaha yang lebih mudah diperoleh dari Malaysia.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia hidupnya tergantung kepada Malaysia mungkin karena adanya kesalahan dalam pengelolaan daerah tersebut. Administrasi kependudukan dan pengelolaan kehidupan warga negara di perbatasan perlu diperhatikan (Srebro & Shosany 2006). Teori pembentukan perbatasan perlu digunakan untuk menganalisis kesalahan pengelolaan perbatasan sehingga membuat daerah yang tertinggal pembangunannya lebih tergantung kepada Malaysia daripada kepada Indonesia.

Kondisi sosial-ekonomi di perbatasan yang terpuruk mengakibatkan masyarakat setempat tergantung kepada negara tetangga. Pada gilirannya, ketergantungan kepada negara tetangga itu mengakibatkan rasa nasionalisme masyarakat tersebut mengalami penurunan. Dalam penelitian ini nasionalisme didefinisikan

sebagai suatu rasa kesadaran untuk memiliki sebuah bangsa atau rasa cinta terhadap negaranya, sehingga disebut “nasionalisme”. Nasionalisme, menurut Smith (2001:11), muncul akibat dari keinginan individu untuk menjadi bagian dari suatu bangsa; nasionalisme juga dibentuk oleh faktor keturunan sehingga sekalipun seseorang telah bermigrasi dia tetap merupakan bagian dari bangsa tersebut. Pendapat tentang nasionalisme tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk menentukan pengaruh permasalahan socio-ekonomi terhadap rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan negara.

Patton (2009) dalam penelitiannya mengenai perbatasan di Kalimantan Timur-Malaysia menjelaskan bahwa kurangnya perhatian terhadap pembangunan wilayah perbatasan mengakibatkan dampak negatif pada kedaulatan negara, ketahanan dan ideologi bangsa, memudarnya wawasan kebangsaan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan bagi masyarakat di daerah perbatasan negara. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa di daerah perbatasan yang tidak memperoleh perhatian cenderung terjadi krisis nasionalisme. Hasil penelitian terdahulu tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam di daerah lain, yakni di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia yang sekaligus dilengkapi dengan upaya mengembangkan model program untuk mengatasinya, khususnya melalui program PLS. Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan masalah socio-ekonomi yang muncul di daerah perbatasan; (2) mencari akar masalah socio-ekonomi tersebut; (3) mengidentifikasi dampak masalah socio-ekonomi tersebut, terutama yang terkait dengan nasionalisme; dan (4) mendeskripsikan dampak program pembinaan nasionalisme terhadap para pemuda di daerah perbatasan negara tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data, uraian tertulis, dan uraian verbal kemudian dikaitkan dengan data, uraian tertulis, dan uraian verbal lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga diperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.

Sumber data penelitian ini ialah para pemuda Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti program PLS untuk pembinaan nasionalisme di PKBM Kampus Desa di Dusun Semanding Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kecamatan Entikong sebagai lokasi penelitian dipilih karena ada gejala yang

menggambarkan bahwa daerah perbatasan negara tersebut juga menjadi daerah belakang dari pusat-pusat permukiman yang ada di Serawak dan Kalimantan Barat. PKBM Kampus Desa dipilih karena memiliki program pembinaan nasionalisme bagi para pemuda perbatasan. Penelitian ini sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan tentang pengelolaan daerah perbatasan terutama untuk mengantisipasi terjadinya krisis nasionalisme di kalangan pemuda.

Untuk dapat memperoleh masukan data yang akurat, penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap: (1) menganalisis data sekunder terkait daerah perbatasan negara dari instansi pemerintah maupun internasional; (2) melakukan tinjauan pustaka yang terkait dengan daerah perbatasan negara; (3) melakukan penggalan data primer melalui wawancara mendalam dan *focused group discussion* (FGD) kepada para pemuda Kecamatan Entikong yang tinggal di tiga desa saling yang berjauhan terkait problem secara geografis, teritori, etnografi, serta demografi; (4) menganalisis seluruh data dan melaksanakan kegiatan PLS sebagai upaya pembinaan nasionalisme diikuti dengan wawancara mendalam dan FGD untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program; dan (5) menganalisis seluruh data dan menginterpretasinya sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap akhir penelitian ini, untuk penajaman hasil telah dilakukan validasi dengan melibatkan para ahli melalui seminar terbatas dan seminar nasional. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2010 dan 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakup permasalahan socio-ekonomi di daerah perbatasan negara berikut penyebab dan pengaruhnya terhadap nasionalisme, serta program PLS sebagai upaya pembinaan nasionalisme pada para pemuda daerah perbatasan.

Permasalahan di Daerah Perbatasan Negara

Entikong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia sehingga sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyeberang sungai maupun laut. Dari hasil identifikasi diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Entikong banyak penduduk yang miskin.

Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Entikong

Banyak penduduk Kecamatan Entikong yang miskin, sebagian di antara mereka membuka warung

kaki lima yang kumuh untuk menjual barang yang hampir semuanya produk Malaysia. Mereka lebih mengenal produk Malaysia daripada produk Indonesia, karena mudah mendapatkannya dan murah. Mereka sulit memperoleh produk Indonesia karena jarang ada dan mahal. Mereka kecewa terhadap Indonesia karena sering menemui kesulitan hidup yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dan fasilitas umum di kecamatan setempat. Mereka justru salut terhadap Malaysia karena tetangga mereka yang berkebangsaan Malaysia hidupnya lebih sejahtera dan mereka selama ini sering memperoleh sumber nafkah dari Malaysia. Mereka lebih akrab dengan uang ringgit Malaysia daripada rupiah sebab dalam bertransaksi lebih sering menggunakan ringgit Malaysia.

Kemiskinan penduduk Kecamatan Entikong tampak dari kehidupan masyarakat Desa Suruh Tembawang yang merupakan desa terdepan di Indonesia yang tinggal di rumah-rumah kayu berderet panjang, berdiri di atas papan kayu dan tiang bambu. Mereka hanya bisa menjangkau pusat kecamatan dengan menarungi riam Sungai Sekayam yang ganas sejauh 64 km dengan biaya mahal atau melalui jalan darat dengan menyeberang sungai ke wilayah Malaysia lalu berjalan melintasi hutan selama sehari penuh dan masuk kembali ke wilayah Indonesia melalui Tebedu-Entikong. Untuk jual-beli barang kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa itu memilih ke Kampung Gun Sapit karena cukup berjalan kaki daripada ke ibukota kecamatan yang jauh dan mahal. Mereka di kampungnya sulit mendapatkan jaringan telekomunikasi. Untuk menikmati arus listrik, mereka harus membeli generator yang bahan bakarnya lima ringgit Malaysia per liter.

Penyebab kemiskinan di perbatasan Indonesia-Malaysia adalah tidak memadainya infrastruktur dan terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan. Kondisi Kecamatan Entikong sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi di wilayah Malaysia. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten membuat pembangunan di daerah perbatasan negara itu sering dilupakan. Pemerintah masih memprioritaskan bidang pertahanan keamanan negara dan menganggap remeh bidang kesejahteraan; sehingga masyarakat setempat merasa iri terhadap tetangga terdekat mereka yang merupakan wilayah Sarawak yang telah menikmati layanan berupa air bersih, listrik, jalan rabat beton menuju jalan raya, dan telekomunikasi.

Kemiskinan yang melanda masyarakat Kecamatan Entikong juga disebabkan oleh terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut. Desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Entikong kini masih terbatas layanan kesehatannya. Sarana kese-

hatan yang ada hanya terdiri dari satu unit puskesmas dan satu unit puskesmas pembantu, bahkan di Desa Suruh Tembawang yang merupakan desa yang paling terpencil di kecamatan tersebut layanan kesehatannya sangat minimal, yaitu hanya terdapat satu pondok bersalin desa yang terletak di Dusun Suruh Tembawang yang ditangani seorang bidan.

Hingga kini ada dusun yang belum terdapat polindes, sehingga masyarakat sangat kesulitan dalam bidang kesehatan. Terbatasnya layanan kesehatan itu erat kaitannya dengan terbatasnya infrastruktur berupa jalan. Jalan menuju desa-desa yang berbatasan langsung dengan Sarawak seperti Desa Suruh Tembawang telah lama mengalami kerusakan dan medannya memang sangat berat, sehingga layanan kesehatannya sangat mahal. Banyak dusun yang tidak bisa dijangkau, sehingga layanan diberikan bergiliran, bagi dusun yang tidak terjangkau maka penduduk setempat menggunakan jasa dukun untuk proses persalinan. Mereka yang sakit diobati dengan menggunakan cara tradisional yang turun-temurun. Proses rujukan dalam pemberian layanan kesehatan terhambat oleh infrastruktur jalan. Sebenarnya sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas sudah mulai dilengkapi, namun upaya itu mubazir karena infrastruktur yang berupa jalan belum diperbaiki. Dengan keadaan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan keadaan geografis yang sangat sulit serta pendanaan yang terbatas, maka di desa tersebut hanya dilakukan layanan kesehatan yang meliputi layanan imunisasi bayi, balita, dan ibu hamil, layanan KB, layanan kesehatan umum, dan layanan kesehatan gigi yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali. Wilayah kerja yang luas dan sangat sulit tersebut hanya ditempati oleh dua tenaga bidan desa dan mempunyai dua poskesdes/polindes.

Di daerah pedalaman yang antardusun jarak tempuhnya perlu berjam-jam hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki dalam kondisi jalan tanah setapak berbukit dan berbatu tersebut belum ada tenaga kesehatan (bidan atau perawat). Banyak tantangan dihadapi tenaga medis wanita di Kecamatan Entikong. Medan yang dihadapi sangat berat, sebagian besar jalan rusak, bahkan ada yang hanya bisa dilalui transportasi air selama tujuh jam. Saat motor air karam, mereka turun dari motor air itu dan hampir tenggelam. Di Desa Suruh Tembawang Hanya ada satu polindes dengan satu tenaga medis dan tidak ada dokter. Untuk beberapa dusun di desa itu sudah ada bidan, tetapi medan yang harus dilalui untuk mencapai dusun-dusun di sana cukup sulit dan biaya yang dikeluarkan juga besar.

Desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Entikong kini masih terbatas layanan pendidikannya. Penduduk Kecamatan Entikong yang tidak tamat SD berjumlah 2.799 orang. Sekolah yang tersedia terdiri

dari satu TK, 18 SD, dua SMP, dan dua SMK. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Entikong berada dalam situasi keterbelakangan sehingga dimanfaatkan oleh para calo tenaga kerja untuk merekrut para tenaga kerja untuk dipekerjakan secara illegal di Malaysia. Kualitas pendidikan masyarakat Desa Suruh Tembawang amat rendah, sebab di desa itu hanya ada enam SD dan satu SMP negeri. Terbatasnya infrastruktur membuat tidak semua warga usia sekolah bisa sekolah, bahkan di Dusun Gun Tembawang yang letaknya paling jauh dari pusat desa dan berbatasan langsung dengan Kampung Gun Sapit Sarawak tidak ada SD. Desa Suruh Tembawang mengalami keterbatasan jumlah guru. Di Dusun Gun Jemak ada guru yang pernah selama 3,5 tahun menjadi satu-satunya guru di SD. Dia merangkap mengajar anak-anak 98 orang siswa di sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Masyarakat Kecamatan Entikong pada umumnya tidak lancar berbahasa Indonesia dan buta huruf. Banyak di antara mereka yang tidak mengenyam pendidikan. Karena itu para orangtua yang hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu Malaysia. Belasan dusun di sepanjang perbatasan Kecamatan Entikong dengan penduduk rata-rata 700 jiwa, 30% di antaranya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf. Sebagian di antara dusun itu belum punya SD, sedangkan dari dusun itu ke SD yang ada di dusun lain jalannya cukup jauh dan sulit sehingga puluhan anak usia SD tidak bersekolah. Ketua PGRI Kecamatan Entikong merasa iri melihat SD Malaysia yang siswanya hanya berjumlah 120 orang, tetapi tersedia 15 orang guru dan seorang tenaga administrasi. Siswa kelas 3 saja di SD Malaysia itu sudah menggunakan internet dalam pembelajarannya, selain itu di SD Malaysia tersebut tersedia asrama untuk siswa rumahnya jauh dari sekolah itu. Sebaliknya, SMPN 4 Entikong hanya diajar oleh guru-guru yang tidak sesuai kualifikasinya, bahkan ada lulusan SMA yang dijadikan guru honorer untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan kesenian, setiap guru mengajar dua atau tiga mata pelajaran. Bahkan di Desa Suruh Tembawang ada satu guru yang harus mengajar 111 orang siswa SD. Selain itu, desa yang berpenduduk 2.795 jiwa itu pendidikan warganya memprihatinkan karena 963 jiwa masih buta aksara dan 689 jiwa tidak tamat SD. Sedangkan di SMPN 2 Suruh Tembawang 73 siswanya mempelajari teknologi informasi dan komunikasi tanpa menyentuh komputer. Sekolah belum punya aliran listrik.

Semua permasalahan tersebut berpengaruh terhadap terjadinya migrasi kependudukan, perdagangan

manusia dan penyelundupan, serta krisis nasionalisme.

Kemiskinan, Krisis Nasionalisme, dan Migrasi

Krisis nasionalisme bisa berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat Kecamatan Entikong merasa bosan dikunjungi oleh para pejabat pemerintah pusat (dirjen, menteri, dan anggota DPR RI) yang menurut mereka hanya untuk *lips servis* tanpa realisasi; sebab selama ini untuk menyediakan listrik saja pemerintah tidak pernah bisa, jalan di Kecamatan Entikong juga banyak yang rusak. Menurut mereka kunjungan para pejabat pemerintah pusat itu tidak ada hasilnya, sebab dalam setiap kunjungan pejabat pemerintah pusat mengatakan bahwa daerah perbatasan negara adalah beranda depan, tetapi jalannya tetap rusak. Adanya pengaruh kemiskinan terhadap krisis nasionalisme di Kecamatan Entikong tampak pada terjadinya migrasi penduduk dari desa-desa di Indonesia ke Malaysia dan terjadinya beberapa tindak kejahatan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berupa perdagangan manusia, penyelundupan, dan imigran gelap.

Kemakmuran yang timpang itu membuat ratusan pemuda bermigrasi ke Malaysia. Masyarakat Kecamatan Entikong ada yang ingin pindah menjadi warga negara Malaysia karena selama ini program pembangunan pemerintah Indonesia tidak sampai ke dusun itu. Mereka mengaku dirinya merasa lebih nyaman menjadi warga negara Malaysia, sehingga sejak tahun 1990 ada ratusan warga di kecamatan itu yang pindah menjadi warga negara Malaysia. Mereka beralih menjadi warga negara Malaysia karena kesamaan etnis, mengejar pendidikan, memperbaiki perekonomian, dan mencari kemudahan akses.

Perdagangan Manusia, Penyelundupan, dan Imigran Gelap

Perlindungan perbatasan (dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya) lewat Entikong dijaga cukup ketat di Pos Tebedu. Meskipun demikian, pemeriksaan yang ketat itu dimanfaatkan oleh para calo Indonesia untuk mengeruk keuntungan. Banyak calo yang akrab dengan petugas sehingga bisa melobi agar bisa lolos pemeriksaan dengan cara main suap. Aktivitas percaloan itu tampaknya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkiprah di bidang kejahatan yang berupa perdagangan manusia, penyelundupan, dan imigran gelap. Pada setiap jenis kasus itu tampak adanya pengaruh dari kemiskinan yang melanda masyarakat Kecamatan Entikong terhadap terjadinya

krisis nasionalisme di daerah perbatasan negara tersebut.

Kecamatan Entikong kini sangat memprihatinkan karena menjadi tempat beroperasinya para pelaku kejahatan, termasuk perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia di Kecamatan Entikong tidak hanya warga sekitar, ada yang berasal dari provinsi lain. Kecamatan Entikong sering menjadi tempat transit kegiatan penyelundupan wanita di bawah umur ke Malaysia. Kecamatan itu merupakan pintu keluar-masuk bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI), baik yang memiliki izin kerja maupun yang tidak memiliki izin kerja. Dalam sehari, penduduk Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui Entikong rata-rata 250 orang. Tidak kurang dari 80% TKI yang masuk ke Malaysia melalui Kecamatan Entikong adalah *illegal*. Ini bisa dikategorikan sebagai perdagangan manusia yang menjadi bukti bahwa sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan TKI, yakni UU No 39 tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak berjalan di kecamatan itu. Perdagangan manusia itu dilakukan oleh aparat pemerintah dan para calo tenaga kerja.

Jalan tikus (jalan setapak) di sepanjang perbatasan negara setiap hari digunakan berbagai tindak kejahatan, khususnya perdagangan manusia yang berbentuk penyelundupan wanita-wanita muda Indonesia ke Malaysia untuk dijadikan pelacur. Para wanita pelacur yang dijual ke Malaysia itu cukup banyak yang berusia di bawah umur (mereka adalah komoditas yang sangat laris), padahal itu tergolong pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat. Perdagangan manusia itu menampakkan wajah bopeng bangsa Indonesia di depan bangsa Malaysia dan orang Indonesia telah dilecehkan oleh Malaysia karena ratusan ribu pembantu rumah tangga dan ribuan pelacur setiap tahun diekspor ke Malaysia.

Di kecamatan Entikong juga sering terjadi penyelundupan. Entikong sangat terbuka untuk praktik penyelundupan berbagai barang, baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. Salah satu barang yang sering diselundupkan ke Malaysia ialah ikan Arwana. Ikan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia tersebut didapatkan dari Kabupaten Sekadau. Barang yang sering diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia misalnya berupa sabu-sabu. Selain itu kecamatan Entikong juga sebagai pintu keluar-masuknya imigran gelap. Dampak negatif yang perlu diwaspadai dari masuknya orang asing ialah masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa, timbulnya pelanggaran dan kejahatan berupa kejahatan lintas negara, terorisme, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Kecamatan Entikong berpe-

luang menjadi tempat masuknya imigran gelap. Tidak terpantaunya secara maksimal semua pintu perbatasan negara dan keramahan masyarakat setempat dalam menerima masuknya orang asing ke daerah mereka mengakibatkan Kecamatan Entikong kini menjadi tempat transit para imigran gelap. Bila dibiarkan, maka tidak mustahil Kecamatan Entikong akan rapuh dan rawan karena kini di daerah itu patok-patok batas negara sebagian telah berubah tempat.

Program PLS yang Diperlukan oleh Pemuda daerah Perbatasan Negara

Kemiskinan masyarakat tersebut bisa diatasi dengan melaksanakan pembangunan dan perawatan infrastruktur serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan dan perawatan infrastruktur. Meskipun demikian, tidaklah mudah dilaksanakan upaya pembangunan dan perawatan infrastruktur jika masyarakat berada pada tingkatan pendidikan yang rendah. Demikian pula tidaklah mudah melaksanakan upaya peningkatan layanan kesehatan bilamana tingkat pendidikan masyarakat juga rendah. Bahkan juga tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan layanan pendidikan jika tingkat pendidikan masyarakat juga rendah. Karena itu pelayanan yang baik di bidang pendidikan kepada masyarakat sangatlah penting.

Di Kecamatan Entikong telah terjadi krisis nasionalisme. Masyarakatnya hidup dalam ketergantungan kepada bangsa lain, yaitu Malaysia. Mereka seakan tidak bisa hidup sejahtera bilamana tidak mengalah kepada masyarakat Malaysia yang selama ini memberikan kemudahan kepada keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian dikhawatirkan tingkat keberanian mereka untuk bela negara di hadapan masyarakat Malaysia sangatlah rendah. Bila hal itu dibiarkan, maka suatu saat nanti bisa jadi mereka akan memihak Malaysia dalam berbagai urusan, misalnya dalam penentuan tapal batas atau bahkan di medan pertempuran seandainya Indonesia memutuskan untuk perang melawan Malaysia. Sekarang sudah banyak masyarakat yang pindah kewarganegaraannya ke Malaysia, dan sebagian di antara mereka di Malaysia bekerja sebagai Askar Wathaniyah. Melalui PLS upaya meningkatkan keberanian untuk membela negara bisa dilakukan.

Masyarakat yang miskin mudah menggadaikan dirinya kepada pihak yang memberi mereka kebutuhan pokok. Mereka tidak punya daya tawar untuk memilih yang lebih baik bagi bangsanya karena yang mereka lihat dan mereka dengar setiap saat adalah kejayaan

bangsa lain. Dengan keterbatasannya itu maka mereka tidak punya akses untuk melihat dan mendengar tentang kejayaan dan budaya unggul bangsa sendiri. Karena itu kepada mereka perlu diberikan layanan program PLS yang bisa membuat mereka memiliki tekad melestarikan budaya Indonesia, antara lain dengan membawa mereka ke berbagai tempat yang ada di Indonesia agar bisa melihat dan mendengar secara langsung tentang keluhuran budaya Indonesia.

Selama ini masyarakat daerah perbatasan negara mengalami kebuntuan untuk bisa mencintai produk dalam negeri, bahkan mata uang yang lebih akrab dengan mereka juga bukan rupiah, melainkan ringgit Malaysia. Melalui program PLS mereka perlu diubah pendiriannya supaya lebih mencintai produk Indonesia dan mata uang Indonesia. Caranya ialah mereka dilibatkan dalam kehidupan yang akrab dengan produk dan mata uang Indonesia. Selain itu secara perlahan mereka dibimbing agar lebih mencintai produk dan mata uang Indonesia.

Argumentasi yang mudah untuk pembenaran terhadap kondisi yang membuat masyarakat Kecamatan Entikong lebih akrab dengan budaya Malaysia, lebih sering menggunakan ringgit Malaysia, dan lebih banyak menggunakan produk Malaysia ialah karena mereka tidak mendapatkan layanan kesejahteraan dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka, maka ada celah untuk memperbaikinya melalui program PLS, yaitu dengan memotivasi usaha mandiri dalam bidang ekonomi agar tidak tergantung pada pihak asing.

Masyarakat Kecamatan Entikong memang kurang memperoleh dorongan untuk meraih pendidikan yang memadai. Di samping faktor pendukung yang tersedia di daerah itu sangat sedikit, kemauan dari dalam diri warga masyarakat setempat untuk belajar tergolong rendah. Untuk itu maka perlu ada layanan program PLS kepada mereka untuk penguatan semangat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah memang cenderung tingkat partisipasinya terhadap pembangunan juga rendah, sebab masyarakat yang demikian itu memiliki kebiasaan hidup tergantung kepada alam dan tergantung pada nasib. Mereka biasanya tidak terdorong untuk berbuat sesuatu ketika di daerah tempat tinggal mereka mengalami keterbatasan di bidang infrastruktur. Biasanya yang mereka lakukan ialah menggerutu dan menyalahkan pihak lain. Mereka masih bisa berubah bilamana ada upaya yang serius, yaitu melalui penyelenggaraan program PLS untuk penguatan semangat berpartisipasi membangun dan merawat infrastruktur di daerah.

Selanjutnya yang tidak boleh dianggap remeh ialah adanya hambatan komunikasi antara warga ma-

syarakat Kecamatan Entikong dengan warga masyarakat yang lain. Dari tinjauan etnografi dan sosiologi memang warga masyarakat Kecamatan Entikong tergolong sulit berdialog dengan masyarakat lain. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak di daerah mereka harus dilaksanakan pembangunan di segala bidang, dan untuk bisa melaksanakan pembangunan itu diperlukan kemampuan berdialog dengan berbagai pihak. Karena itu masyarakat perlu dibantu agar biasa berdialog dengan berbagai pihak untuk pembangunan melalui program PLS. Pihak yang perlu dididik melalui program PLS untuk memberdayakan masyarakat Kecamatan Entikong adalah seluruh lapisan masyarakat, namun bila dihitung skala prioritasnya yang mendesak untuk dilayani adalah mereka yang berusia pemuda. Mereka yang berusia pemuda itulah yang memungkinkan untuk segera menjadi pelopor bagi segenap warga masyarakatnya, lebih-lebih jika program PLS untuk pembinaan nasionalisme itu dilaksanakan di Malang yang sangat jauh jaraknya dari kampung halaman mereka.

Program PLS bagi Pemuda daerah Perbatasan Negara

Penelitian ini telah mengembangkan program PLS yang dapat menumbuhkan nasionalisme pada diri para pemuda perbatasan. Dalam penelitian ini juga digunakan teori yang relevan dengan upaya pengembangan model pembinaan nasionalisme untuk pembinaan nasionalisme, yaitu teori tentang prinsip, strategi, metode, dan teknik pembelajaran partisipatif dan teori tentang prinsip, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam program pendidikan taruna mandiri yang pernah dikembangkan oleh peneliti pada tahun 1997 s.d 2000. Upaya pengembangan model pembinaan nasionalisme juga dilakukan oleh peneliti dengan memadukan antara model program pembelajaran partisipatif dengan model program pendidikan taruna mandiri. Menurut Sudjana (1993: 1), program pembelajaran partisipatif merupakan model program yang perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemantapan sub sistem PLS dalam sistem pendidikan nasional, sebab program pembelajaran partisipatif harus selalu disesuaikan dengan kemajuan proses pembelajaran dalam PLS. Model program pembelajaran partisipatif merupakan pendekatan yang memiliki sifat fleksibel dan terbuka. Sifat inilah yang mendorong peneliti berupaya mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan teknik yang cocok untuk program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme di daerah perbatasan negara. Model program pendidikan taruna mandiri ialah program PLS yang mengedepankan prinsip, strategi, metode, dan teknik membelajar-

kan para pemuda agar bisa hidup mandiri. Dalam model program pendidikan taruna mandiri tersebut terdapat prinsip, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mengadaptasi berbagai prinsip, strategi, metode, dan teknik pembelajaran; termasuk model program pembelajaran quantum. Penerapan berbagai prinsip, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diadaptasi dari model program pembelajaran partisipatif dan model pendidikan taruna mandiri itu dalam penelitian ini disinkronkan dengan temuan tentang problematika dan solusinya untuk pembinaan nasionalisme di daerah perbatasan.

Kegiatan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya pembelajaran ialah membangun harmonisasi dengan masyarakat sekitar, *brainstorming*, dan *problem solving*. Kegiatan membangun harmonisasi dengan masyarakat sekitar dilaksanakan untuk membina kerjasama yang baik di masyarakat untuk membangun kekompakan warga belajar (WB) dan pendidik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kegiatan itu juga dilaksanakan untuk mengurangi kebiasaan bersaing secara perseorangan dalam kehidupan bersama. Kegiatan ini perlu dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, apalagi WB dalam program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme mempunyai latar belakang kehidupan yang beragam. Dengan kegiatan itu maka tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan program akan terbina dan persaingan perorangan akan dapat dikurangi atau dihindarkan. Kegiatan harmonisasi ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran para WB tentang pentingnya tukar-menukar pikiran dan pengalaman, untuk meningkatkan kerjasama, dan untuk lebih memahami kebutuhan orang lain. Dengan terlaksananya harmonisasi itu diharapkan masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan baik, WB dapat bekerja dengan penuh semangat, akan terpupuk kerjasama antarpihak sehingga saling memperhatikan kebutuhan sesama WB dan terbina rasa tanggung jawab untuk meraih keberhasilan bersama.

Brainstorming merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu forum yang anggotanya memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat demi terlaksananya program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme. Tahapan yang dilalui dalam kegiatan *brainstorming* ialah (1) pendidik menyampaikan pertanyaan kepada WB tentang kebutuhan belajar, faktor pendukung, dan faktor penghambat program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme, (2) WB mengemukakan pendapatnya secara bergiliran dan tidak boleh mengomentari gagasan yang dikemukakan WB (baik komentar positif ataupun

komentar negatif), (3) gagasan dan pendapat semuanya ditampung untuk dianalisis (dalam hal itu pendidik perlu menunjuk seorang notulen). Hasil kegiatan *brainstorming* itu ditindaklanjuti dengan kegiatan *problem solving*. Kegiatan *problem solving* juga dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dalam program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme berlangsung. Kegiatan itu diarahkan untuk keperluan perancangan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang komprehensif. Tahapan kegiatan tersebut ialah (1) pendidik mengorganisasikan pertemuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, (2) WB mengidentifikasi masalah yang didasarkan atas kebutuhan, (3) WB mengidentifikasi berbagai alternatif program yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah, dan (4) WB mengembangkan komponen-komponen program.

Kegiatan yang dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran ialah refleksi yang berupa evaluasi partisipatori yang dilaksanakan untuk mengevaluasi program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme bertolak dari pengalaman dan kepentingan para WB secara bebas. Manfaat dari kegiatan ini ialah penyelenggara program PLS bisa mengetahui secara langsung mengenai apa yang dipikirkan oleh WB tentang keberhasilan program yang mereka ikuti. Tahapan kegiatannya ialah (1) pendidik menyiapkan panduan pertanyaan; (2) pendidik menumbuhkan suasana terbuka dan akrab; (3) pendidik mempersilakan WB untuk menuliskan hasil penilaiannya tentang keberhasilan program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme di kertas plano yang telah disiapkan dan mencegah timbulnya kritik antar WB, (4) pendidik dan WB berdiskusi untuk menentukan prioritas hasil penilaian yang telah tertulis di kertas plano; serta (5) pendidik bersama WB menyimpulkan penilaian tentang keberhasilan program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme.

Program PLS: Peningkatan Keberanian Bela Negara

Program yang pertama dikembangkan adalah program PLS yang bertujuan meningkatkan keberanian bela negara Indonesia para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme. WB dalam program PLS ini adalah para pemuda yang sejak kecil melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia di kampung halamannya tidak lebih kaya bila dibandingkan dengan masyarakat Malaysia yang tinggal di kampung sebelah. Untuk itu mereka perlu dibangun keyakinannya bahwa dirinya kelak pasti bisa menjadi orang yang berhasil.

Prinsip yang menjadi acuan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keberanian bela negara Indonesia pada diri para pemuda perbatasan ialah warga belajar (WB) didorong agar berani mengatasi masalah yang menimpa negaranya dan tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan bangsanya tertimpa masalah. Keberanian WB itu diwujudkan dalam program aksi yang realistik untuk mendukung upaya menghindarkan negaranya dari gangguan negara lain. Ada beberapa strategi yang diterapkan dalam program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme untuk peningkatan keberanian bela negara, yakni WB dibimbing agar mampu: (1) menemukan musuhnya, (2) berolah raga, (3) memperoleh kebebasan, dan (4) mengajar.

Program PLS: Penguatan Tekad Pelestarian Budaya Bangsa

Program yang dikembangkan adalah program PLS yang bertujuan untuk menguatkan tekad untuk melestarikan budaya Indonesia pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme. Selama tinggal di pedalaman, WB hanya melihat budaya suku mereka. Walaupun mereka juga melihat budaya lain maka yang sering tampak oleh mereka justru budaya masyarakat Malaysia, sebab radio dan televisi yang siarannya lebih mudah mereka ikuti adalah radio dan televisi Malaysia. Oleh karena itu mereka diajak mengikuti program pembelajaran untuk menguatkan tekad melestarikan budaya Indonesia melalui berbagai media.

Ada prinsip yang menjadi acuan dalam pembelajaran untuk menguatkan tekad untuk melestarikan budaya Indonesia pada para pemuda perbatasan. Prinsip itu ialah WB didorong agar berusaha menemukan penyebab luntarnya budaya Indonesia dan kemudian berusaha untuk melestarikannya. Usaha itu tidaklah mudah, untuk itu WB perlu dibimbing agar memiliki tekad yang kuat dengan menanamkan semboyan: “ini mungkin susah tetapi memungkinkan untuk dilakukan”, bukannya berkata “ini mungkin dilakukan tetapi terlalu susah untuk dilakukan”. Jika mereka melakukan kesalahan dibiasakan untuk berkata “saya melakukan kesalahan”, bukannya berkata “itu bukan kesalahan saya”. Dalam program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme di Malang yang bertujuan untuk penguatan tekad pelestarian budaya bangsa, maka pembelajaran dilaksanakan dengan beberapa strategi, yakni (1) pembelajaran melalui media, (2) pembelajaran menggunakan musik, dan (3) pembelajaran dengan cinta dan permainan.

Program PLS: Motivasi Penggunaan Mata Uang Indonesia

Program yang dikembangkan adalah program PLS yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi penggunaan mata uang Indonesia pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme. Mereka sebelumnya tidak pernah dibekali kemampuan mencari uang, berdagang, menghindari kerugian, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka tidak peduli dengan pengorbanan (terutama pengorbanan uang) karena tidak memiliki kecerdasan finansial.

Ada prinsip yang menjadi acuan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi penggunaan mata uang Indonesia pada diri para pemuda daerah perbatasan negara. Prinsip itu ialah WB dibimbing agar memiliki komitmen untuk menggunakan mata uang rupiah secara serius (bukan sekedar janji) dan diarahkan agar memiliki idaman kelak di kampung halamannya masyarakat lebih bangga terhadap mata uang rupiah daripada ringgit Malaysia atau dollar Brunei. Selanjutnya mereka dibimbing menyusun rencana untuk mewujudkan idamannya itu. Strategi pembelajaran untuk memotivasi penggunaan mata uang Indonesia dalam program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme adalah pembelajaran mengemban amanah, pembelajaran dengan keteladanan, dan pembelajaran dengan pertemanan.

Program PLS: Peningkatan Minat Penggunaan Produk Indonesia

Program yang dikembangkan adalah program PLS yang bertujuan untuk meningkatkan minat penggunaan produk dalam negeri pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan rasa cinta tanah. Ada prinsip yang menjadi acuan dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat penggunaan produk dalam negeri pada diri para pemuda daerah perbatasan negara. Prinsip itu ialah WB didorong agar memiliki minat yang besar untuk menggunakan produk dalam negeri dengan melibatkan mereka secara aktif dalam kelompok yang lebih mengutamakan mengidentifikasi keuntungan dalam penggunaan produk dalam negeri daripada menghitung-hitung kerugiannya. Upaya peningkatan minat penggunaan produk Indonesia bagi para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme di Malang dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran aktif, pembelajaran yang mempesona, dan pembelajaran dengan humor dan pujian.

Program PLS: Motivasi Usaha Mandiri Bidang Ekonomi

Pendidikan yang pernah diperoleh WB di sekolah dulu mungkin saja sudah bertujuan membentuk kemandirian, namun dalam praktiknya sering jauh dari harapan karena pelajaran ekonomi hanya bersifat hafalan; tanpa ada upaya membangun nilai dan sikap ekonomis. Di rumah, orangtua mereka kurang mengerti tentang cara mendidik anak, karena mereka sendiri tidak mengenyam pendidikan. Program PLS yang dikembangkan untuk meningkatkan motivasi usaha mandiri dalam bidang ekonomi agar tidak tergantung pada pihak asing pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme memegang prinsip: WB didorong agar berupaya “win-win solution” (bukannya ingin sukses di atas kegagalan orang lain), sehingga mereka perlu dibimbing agar melihat prospek (bukannya suka menoleh ke masa lalu). Peningkatan motivasi usaha mandiri bidang ekonomi bagi para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran dalam kondisi terjepit, pembelajaran ala pondok pesantren, dan belajar dengan menuliskan pengalaman berwirausaha.

Program PLS: Penguatan Semangat Menempuh Pendidikan

Program PLS dikembangkan untuk menguatkan semangat menempuh pendidikan yang lebih tinggi pada diri para pemuda perbatasan dan pembinaan rasa cinta tanah. Ada prinsip yang menjadi acuan dalam pembelajaran untuk menguatkan semangat menempuh pendidikan yang lebih tinggi pada diri para pemuda perbatasan memegang prinsip: WB didorong agar memilih kegiatan belajar seperti yang ingin mereka lakukan (bukan sekedar mengekor orang lain), dilatih untuk belajar dengan cara yang tepat berdasarkan argumen yang kuat tetapi dengan kata yang lembut (bukannya mengutarakan argumen yang lemah tetapi dengan kata yang kuat), serta dibimbing agar di dalam menuntut ilmu memiliki semboyan: “tidak akan melakukan sesuatu yang berakibat buruk bagi orang lain” (bukan semboyan: “akan melakukan sesuatu yang berakibat buruk bagi orang lain sebelum orang lain melakukan sesuatu yang berakibat buruk bagi dirinya”). Upaya untuk penguatan semangat menempuh pendidikan bagi para pemuda perbatasan yang ikut program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme dilaksanakan dengan menerapkan model: (1) pembelajaran melalui nonton bareng film *Laskar Pelangi*,

(2) pembelajaran dengan berupaya mengatasi kesulitan belajar, (3) pembelajaran dengan sentuhan cinta, (4) pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran, dan (5) pembelajaran sesuai karakter WB dan gaya belajarnya.

Program PLS: Penguatan Partisipasi Membangun/Merawat Infrastruktur

Program PLS dikembangkan untuk menguatkan semangat berpartisipasi membangun dan merawat infrastruktur di daerah pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam upaya pembinaan nasionalisme memegang prinsip: WB didorong membuat sesuatu terjadi (bukannya membiarkan sesuatu terjadi), dibiasakan menjadi orang yang “talk less do more” (bukannya “do less talk more”), dan dibimbing agar bersemboyan: “banyak action sedikit mengeluh” (bukan banyak mengeluh tanpa action). Dalam upaya penguatan partisipasi membangun dan merawat infrastruktur, para pemuda dididik dengan menerapkan beberapa strategi pembelajaran mondok di *pesantren ajaib*, kerjabakti membangun dan merawat infrastruktur, dan menggugah disiplin diri.

Program PLS: Pembiasaan Dialog untuk Pembangunan

Program PLS dikembangkan untuk pembiasaan berdialog dengan berbagai pihak untuk pembangunan daerah pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam upaya pembinaan nasionalisme berprinsip: WB didorong agar melihat peluang di balik masalah (bukannya melihat masalah di balik peluang), dibiasakan agar jika gagal selalu melakukan introspeksi (bukannya jika gagal menyalahkan orang lain), dan jika sukses tidak melupakan orang lain (bukannya selalu gagal dan tidak pernah sukses). Untuk membiasakan berdialog dengan berbagai pihak untuk pembangunan daerah pada diri para pemuda daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti program PLS dalam upaya pembinaan nasionalisme di Malang, strategi pembelajaran yang diterapkan adalah pengembaraan di beberapa daerah di Jawa Timur (di Malang Raya, di Kota Surabaya, di Kawasan Tengger, dan di Kabupaten Banyuwangi), dan belajar dengan cara menulis saran yang membangun.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyak penduduk Kecamatan Entikong yang miskin karena tidak tersedianya infrastruktur yang memadai dan terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan berpengaruh pada migrasi kependudukan, perdagangan manusia, penyelundupan, serta krisis nasionalisme.

Program PLS tentang pembinaan nasionalisme bagi para pemuda daerah perbatasan berupa pembelajaran dapat meningkatkan nasionalisme pada diri para WB dengan cara didorong mengatasi masalah dalam bentuk program aksi sebagai upaya menghindarkan negaranya dari gangguan negara lain, menemukan penyebab luntarnya budaya Indonesia dan ber-

usaha untuk melestarikannya, memiliki komitmen untuk menggunakan mata uang rupiah, lebih mengutamakan menghitung keuntungan dari penggunaan produk Indonesia daripada kerugiannya, mandiri dalam bidang ekonomi dengan berupaya *win-win solution* dan melihat prospek, giat menempuh pendidikan yang lebih tinggi, berpartisipasi membangun dan merawat infrastruktur dengan banyak *action* sedikit mengeluh”, dan gemar berdialog dan cermat melihat peluang di balik masalah..

DAFTAR RUJUKAN

- Patton, A. 8 April 2009. *Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur*. [online] dalam http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3514 [akses 24 Maret 2010].
- Smith, D. & Anthony. 2001. *Nationalism*. Cambridge: Polity Press.
- Srebro, H. & Maxim, S. 2006. Towards a Comprehensive International Boundary Making Model. *TS 63 Geodetic Infrastructure & Theory*.
- Sudjana, H. D. 1993. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif dalam PLS*. Bandung: Penerbit Nusan-tara Press.
- Susilo, W. 18 Februari 2008. *Problematika Perbatasan Indonesia-Malaysia*. dalam <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=122> [akses 19 Maret 2010].